

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID 19 (STUDI KASUS *TRACING* COVID 19 DI KELURAHAN BARATAJAYA KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA)

M. Ilham Putra Arabia¹, Tri Yulianti², Adi Soesiantoro³

^{1,2,3} Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Ilhamarabia028@gmail.com¹, triyuli@untag-sby.ac.id², adisusiantoro@untag-sby.ac.id³

ABSTRACT

The Covid 19 Handling Program is one of the policies made by the government to break the chain of virus transmission, both at regional, regional and national scales. Baratajaya Village as the highest policy holder in the village area has offered a program to overcome the Covid 19. This research is a descriptive qualitative research with research subjects including Baratajaya Village, Task Force, and Warga while the object of this research is the Covid 19 handling policy in Baratajaya Village. In this case, researchers focus on the process of tracing Covid patients. To obtain information, researchers used interviews, observation and documentation. Researchers found that the implementation of the Covid 19 Handling Policy in the Baratajaya Village had not run optimally. This was due to several things, including: the occurrence of miscommunication, the attitude of the residents who were less cooperative, and the absence of training for the task force team while working in the field.

Keywords: Policy Implementation, Handling Covid 19, Kelurahan Baratajaya

ABSTRAK

Program Penanganan Covid 19 merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna memutus mata rantai penularan virus, baik di skala daerah, regional, maupun nasional. Kelurahan baratajaya selaku pemangku kebijakan tertinggi di wilayah kelurahan telah menajankan program penanggulangan covid 19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian antara lain Kelurahan Baratajaya, Satgas, dan Warga sedangkan obyek penelitian ini adalah kebijakan penanganan Covid 19 di Kelurahan Baratajaya. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada proses tracing pasien Covid. Untuk memperoleh informasi peneliti menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Peneliti menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 di Kelurahan Baratajaya belum berjalan secara optimal. Karena beberapa hal antara lain: terjadinya miss komunikasi, sikap warga yang kurang kooperatif, serta tidak adanya pelatihan bagi tim satgas saat bekerja dilapangan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Penanganan Covid 19, Kelurahan Baratajaya

Pendahuluan

Pada tahun 2020, di Indonesia tercatat 134 kasus positif *corona virus disease* ([Covid-19](#)). Berdasarkan data, kasus corona DKI Jakarta dan Jawa Barat, masing-masing sebanyak 47 kasus dan 10 kasus. Banten (5 kasus), Jawa Tengah (5 kasus), DI Yogyakarta (1 kasus), Bali (1 kasus), Kalimantan Barat (1 kasus), dan Sulawesi Utara (1 kasus).¹ Di Jawa Timur sendiri hingga saat ini Berdasarkan peta sebaran corona yang muat dalam situs infocovid-19, hingga

tanggal 23 Maret 2020 pukul 16.02 WIB, selain positif corona ada 1.405 orang dalam pemantauan dan 125 pasien dalam pengawasan khusus. Catatan saja, orang Dalam Pemantauan (ODP) merupakan pasien yang dipulangkan untuk dipantau kesehatannya selama 14 hari oleh Puskesmas di wilayah domisili. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) adalah pasien dirujuk ke RS Rujukan Covid-19 untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan swab tenggorokan dan memastikan positif atau negatif Covid-19. Data tersebut mengungkap Surabaya jadi wilayah Jawa Timur dengan jumlah pasien positif corona sebanyak 29 orang. Lalu, Sidoarjo dengan 3 pasien positif corona. Malang 1 positif corona, Kabupaten Malang 4 positif corona.²Kasus ini terus bertambah seiring bertambahnya waktu, hingga bulan Agustus 2021, tercatat sebanyak 3.774.155 positif covid, 3.247.715 dinyatakan sembuh, dan 113.664 dinyatakan meninggal.³

Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menyatakan bahwa penanganan kasus Covid-19 di Indonesia menunjukkan tanda-tanda membaik. Kemenkes mencatat udah ada 14 provinsi yang konsisten dalam penurunan kasus konfirmasi harian Covid-19 hingga 28 Februari 2022. Kemenkes juga menunjukkan bahwa di beberapa daerah dalam minggu terakhir Februari kemarin mengalami penurunan positivity rate, diantaranya: DKI Jakarta, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Papua, NTB, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Untuk menekan angka kematian, Kemenkes terus meningkatkan dan memperluas layanan kesehatan serta mempercepat laju vaksinasi, salah satunya dengan terus memberikan vaksin lengkap hingga booster sebagai upaya agar pertahanan terhadap virus COVID-19 menjadi lebih tinggi, terutama bagi lansia, pasien dengan komorbid, dan anak-anak terhadap risiko bergejala berat hingga kematian akibat COVID-19.⁴

Jika dilihat dari terus menurunnya kasus covid-19 di atas, dengan demikian dapat dikatakan penanganan kasus covid-19 cukup berhasil. Ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus covid-19. Di Kota Surabaya, diwakili oleh Walikota Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa di Kota Surabaya Positivity rate sudah berada di bawah 50,4. Angka kematian yang menurut WHO seharusnya dibawah , kini menjadi 0,6 / seratus ribu penduduk perminggunya. Untuk itu penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Tracing Covid-19 di Kelurahan Baratajaya Surabaya).

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penyajian data bentuk deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Baratajaya, dengan objek penelitian pada kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid 19 di Kelurahan Baratajaya. Subjek penelitian dalam penelitian adalah Kelurahan Baratajaya, Satgas Covid dan warga. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dan pembahasan

1. Komunikasi

Proses tracing yang merupakan ujung tombak dalam proses penganggulangan Covid 19 di kelurahan Baratajaya juga mengalami hambatan karena adanya miss komunikasi antara satgas

dengan warga yang terdampak. Dalam hal ini kelurahan bersama satgas telah melakukan proses tracing dan menemukan ada pasien suspek covid 19 berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat. Namun warga tersebut bersifat tidak kooperatif dengan menunjukkan sikap tidak mau diajak untuk berkoordinasi dan bekerjasama. Padahal hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penularan dan penyebaran virus di lingkungan kelurahan Baratajaya. Kesadaran dan partisipasi warga yang terjangkit virus sangat rendah karena mereka berpikir ini sebagai suatu aib keluarga bila diketahui oleh pihak luar.

Koordinasi yang sulit dengan warga dalam hal tracing pasien suspek covid 19 membuat implementasi kebijakan berjalan tidak optimal, karena terjadi penolakan yang dilakukan oleh sebagian warga untuk dilakukan proses tracing. Meskipun sudah ada aturan yang jelas bagi para satgas guna melaksanakan tugasnya di lapangan. Mayoritas warga yang bersikap tidak kooperatif merupakan warga pendatang. Selama ini komunikasi yang dilakukan oleh petugas satgas dilakukan secara dua sistem, yaitu daring dan luring. Luring dilakukan jika pasien memungkinkan untuk didatangi secara langsung, sedangkan daring dilakukan jika pasien memang tidak diperbolehkan untuk bertemu secara langsung, biasanya dilakukan komunikasi via telepon maupun WhatsApp guna meminimalisir penyebaran dan penularan virus Covid 19.

2. Sumber daya

Kewenangan yang diberikan oleh dinas kesehatan untuk melakukan proses tracing pasien covid 19 di Kelurahan Baratajaya sudah jelas, karena mengacu pada data yang valid. Sehingga masing-masing orang memiliki perannya masing-masing. Dalam hal ini yang melakukan pelacakan terhadap warga yang terkonfirmasi terjangkit virus dilakukan oleh petugas medis dari Puskesmas. Sedangkan pelaksanaan tracing untuk orang yang pernah melakukan kontak fisik dengan penyintas dilakukan oleh pihak kelurahan dibantu oleh linmas dan warga.

Informasi yang dimiliki oleh satgas covid di kelurahan Baratajaya sudah jelas karena berasal dari dinas kesehatan serta puskesmas setempat. Selain itu untuk Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan tracing dilakukan dengan berpedoman pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Peraturan Walikota No 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Protocol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid 19. Kekurangan dalam hal ini adalah tidak ada pelatihan terlebih dahulu untuk para tracker yang berasal dari unsur non medis, mereka belajar secara otodidak terkait pelaksanaan proses pelacakan pasien covid 19.

Prasarana yang dibutuhkan oleh petugas saat berkerja di lapangan juga sudah terpenuhi, karena para satgas penanggulangan Covid 19 di kelurahan Baratajaya telah dilengkapi dengan masker, faceshield, thermometer suhu, dan handsanitizer. Perlengkapan ini merupakan alat yang digunakan untuk menjaga protokol kesehatan saat bertemu dengan warga. Tentu dalam hal interaksi dengan pasien terjangkit virus maupun yang orang pernah kontak fisik dengan pasien tetap menjaga jarak.

3. Disposisi

Pelaksanaan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Kelurahan Baratajaya dalam hal penanganan covid 19 juga dipengaruhi oleh sikap dari para pelaksana kebijakan. Dimana para petugas Satgas yang berasal dari beberapa elemen masyarakat serta pemerintah memiliki sikap yang baik dan menerima keputusan yang berasal dari pemerintah pusat. Dalam hal ini mereka mengimplementasikan Peraturan Walikota No 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Protocol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid 19 serta Panduan pelaksanaan kontak tracing (pelacakan) pasien covid 19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang telah dibuat.

Sikap warga kelurahan Baratajaya yang bersikap tidak kooperatif karena menolak untuk dilakukan ditracing merupakan wujud penolakan terhadap sebuah kebijakan yang telah dibuat. Meskipun hal ini dilakukan untuk kebaikan mereka, tanpa disadari penularan virus covid 19

yang sangat cepat membuat anggota keluarganya bahkan orang lain ikut terkena dampaknya. Bentuk penolakan warga merupakan reaksi negatif karena mereka tidak sepakat dengan substansi kebijakan penanganan covid 19 yang telah dibuat oleh pemerintah.

4. Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan hirarki atau tingkatan yang dibentuk dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan covid 19. Dalam hal ini Kelurahan Baratajaya yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di lingkup wilayah kelurahan yang melakukan koordinasi dengan lintas instansi maupun organisasi. Penyebaran tanggungjawab dalam setiap tugas dan wewenang telah dibagi menurut regulasi yang ada. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara elemen yang terkait didalamnya. Seperti dalam hal pelacakan pasien yang terjangkit virus dilakukan oleh tenaga medis dari Puskesmas. Sedangkan tracing untuk orang yang pernah melakukan kontak fisik dengan pasien dilakukan oleh linmas dan warga. Tentu dengan adanya pembagian tugas secara jelas dan terperinci akan memudahkan setiap orang untuk menjalankan perannya masing-masing.

Dengan bersatunya beberapa elemen menjadi satu yaitu TNI, Polres, Linmas, Kelurahan Baratajaya, Puskesmas, Dinas Kesehatan, serta warga yang memiliki visi yang sama guna menanggulangi penyebaran dan penularan virus covid 19 di wilayah ini. Hal inilah yang menyebabkan implementasi kebijakan penanggulangan Covid 19 di Kelurahan Barataja berjalan secara optimal.

Kesimpulan

Kelurahan Baratajaya telah membantuk Tim Satgas Covid 19 yang melibatkan berbagai elemen, baik yang pemerintah maupun masyarakat. Upaya pelacakan kontak pasien ini digunakan untuk memutus mata rantai penularan Covid 19. Namun, dalam implementasinya dilapangan mengalami sedikit hambatan atau kendala yaitu dalam hal disposisi dan komunikasi. Dimana sebagian kecil masyarakat yang terkena Covid menolak untuk dilakukan tracing. Selain itu mereka juga menganggap bahwa proses tracing orang yang terkena covid merupakan suatu aib bagi keluarga mereka jika diketahui oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.2012.
- Subarsono, A. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Pustaka Pelajar Jakarta. 2005
- Sutopo, H.B.*Metode Penelitian Kualitatif , Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press. 2002
- Syaukani, *Otonomi Dalam Kesatuan*, Jakarta: Pustaka Yogyakarta,2004.
- Roring, Andreas Delpiero, dkk. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid-19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Governance. Vol. 1. No. 2. 2021
- Ismail , Gusnar. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2020
- Mukoddimah. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin*. Skripsi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2021
- Tiara, Alyysa, dkk. *Pelaksanaan Tracing COVID-19*, Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat. Vol.1, No, 2 Desember. 2021

Yani, Gita Andri. *Analisis Pelaksanaan Pelacakan Kontak (Contact Tracing) Covid-19 Di Puskesmas Wilayah Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2021*. Skripsi. Universitas Andalas Padang. 2021

<https://www.suara.com/yoursay/2020/03/12/133941/perbedaan-epidemi-endemi-dan-pandemi>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/17/persebaran-daerah-pasien-positif-corona-di-indonesia>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200324104758-37-147166/peta-corona-jatim-ini-daerah-kasus-positif-corona-terbanyak>

<https://www.m.facebook.com/KementerianKesehatanRI>

<https://nasional.kontan.co.id/news/2-maret-2022-2-tahun-pandemi-covid-19-49-juta-positif-corona-148660-meninggal>